

Perbandingan Pendapatan Desa di Jawa Barat Menurut Analisis Statistik Keuangan Tahun 2022 dan 2023

Marsha Pratywi Hilmia¹, Khanza Salsabila Khoirunnisa², Nasya Nurfitriah³,
Hana Suryani S⁴, Desi Mustika⁵, Reka Ramadhan⁶

¹Universitas Nusa Putra; pratywihilmia01@gmail.com

²Universitas Nusa Putra; khanzakhoirunnisa061@gmail.com

³Universitas Nusa Putra; nasyanurfitriah9@gmail.com

⁴Universitas Nusa Putra; hanasryn59@gmail.com

⁵Universitas Nusa Putra; desimustika218@gmail.com

⁶Universitas Nusa Putra; reka.ramadhan@nusaputra.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Agustus, 2024

Revised Agustus, 2024

Accepted Oktober, 2024

Kata Kunci:

Perbandingan, pendapatan
desa, Jawa Barat

Keywords:

Comparison, village income,
West Java

ABSTRAK

Desa memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional, dan keuangan desa wajib dikelola secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pembangunan desa. Tujuan dari penerbitan ini adalah buat memberikan gambaran kinerja keuangan desa tahun 2022 serta 2023. Penelitian ini menggunakan metode komparatif buat menganalisis perbedaan pendapatan desa tahun 2022 dan 2023 serta mengevaluasi rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan desa. Data menunjukkan bahwa pendapatan desa tahun 2022 dan 2023 tidak mengikuti distribusi normal, sehingga menggunakan Uji Wilcoxon Signed-Rank non-parametrik. Meskipun ada variasi pendapatan desa antara tahun 2022 dan 2023, perbedaan tadi tidak relatif signifikan buat disebut menjadi perbedaan yg konkret secara statistik. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa pada Jawa Barat relatif stabil antara tahun 2022 serta 2023. yang akan terjadi ini penting bagi para penghasil kebijakan serta pihak terkait lainnya buat tahu dinamika pendapatan desa pada wilayah ini serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yg dapat memengaruhi stabilitas pendapatan desa berasal tahun ke tahun.

ABSTRACT

Villages play a crucial role in national development, and village finances must be managed effectively in accordance with applicable provisions to support village development. The purpose of this publication is to provide an overview of village financial performance in 2022 and 2023. This study uses a comparative method to analyze the differences in village income in 2022 and 2023 and evaluate the ratio of village financial dependency and independence. The data shows that village income in 2022 and 2023 does not follow a normal distribution, so it uses the non-parametric Wilcoxon Signed-Rank Test. Although there is variation in village income between 2022 and 2023, the difference is not significant enough to be called a statistically concrete difference. Therefore, it can be concluded that village income in West Java is relatively stable between 2022 and 2023. What will happen is important for policy makers and other related parties to know the dynamics of village income in this region and consider other factors that can affect the stability of village income from year to year.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Marsha Pratywi Hilmia
Institution: Nusa Putra University
Email: pratywihilmia01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa ialah bagian terkecil dari negara. Desa memegang peranan krusial pada pembangunan nasional. Pembangunan desa ialah titik tolak pembangunan nasional. Desa dibutuhkan mampu mengelola keuangannya menggunakan baik dan konsisten, memberikan pelayanan administrasi, serta mendorong peran serta masyarakat pada pembangunan. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 mengatur ihwal pengelolaan dan pembangunan desa. Dari tahun 2015, pemerintah telah menyampaikan dana kepada desa buat membantu dalam pengelolaan, pengembangan, serta penguatan masyarakat desa. dengan mengikuti Peraturan Menteri dalam Negeri angka 20 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan kedisiplinan, diperlukan dana tersebut bisa dikelola dengan baik. Dari tahun 2015, pemerintah sudah memberikan dana desa buat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan penguatan masyarakat desa. Peraturan Menteri pada Negeri angka 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa memutuskan standar transparansi, akuntabilitas, keteraturan, serta kedisiplinan pada mengelola dana desa. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun setiap tahun sang ketua Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember. APBDesa memuat berita ihwal pendapatan, belanja, serta asal pendanaan.

Publikasi ini menyajikan data pendapatan desa di Jawa Barat pada tahun 2022 dengan 2023 dan tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa mencapai tujuan pembangunan desa. Diharapkan publikasi ini dapat membantu pemerintah desa dan pihak-pihak terkait membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa.

Latar belakang publikasi ini adalah bahwa dana desa digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Kegiatan ini mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, kinerja keuangan desa harus dipantau dan dinilai secara berkala untuk memastikan manajemennya berjalan dengan baik.

Sumber data publikasi ini adalah data pendapatan desa yang dikumpulkan oleh BPS untuk tahun 2022 dan 2023. Data ini diolah dan dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa. Hasilnya keadaan keuangan desa menjadi lebih jelas. Secara umum, publikasi statistik keuangan pemerintah desa memberikan gambaran singkat tentang bagaimana pendapatan desa atau nagari dihasilkan selama periode anggaran satu tahun. pendapatan yang diperoleh selama anggaran satu tahun.

Data ini berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana potensi dan kinerja keuangan desa berkembang seiring dengan kemajuan desa:

- a) Rasio Ketergantungan Keuangan Desa
- b) RasioKemandirian Keuangan desa

Dengan pengecualian DKI Jakarta, data statistik keuangan pemerintah desa di Jawa Barat diperoleh melalui survei di seluruh kabupaten dan kota seluruh provinsi Indonesia. Data dikumpulkan melalui kuesioner K-3 dan sensus langsung ke desa-desa sampel terpilih. Selain itu, laporan siskeudes dapat diperoleh dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan.

Dengan menggunakan sampel, data keuangan pemerintah desa dikumpulkan dari 9.924 desa dan nagari dari 434 kabupaten dan kota. Namun, tingkat respons untuk pengumpulan data ini adalah 94,55% dari 408 kabupaten dan kota.

2. TINJAUAN LITERATUR

Desa, unit negara terkecil, mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa dimulai dari pembangunan nasional, dan desa diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan konsisten, menyelenggarakan pelayanan administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, pemerintah mengatur tata kelola desa. Undang-undang ini menyampaikan kewenangan pada desa buat melaksanakan pembangunan desa guna menaikkan kesejahteraan penduduk desa. tata kelola desa diperlukan bisa membuat pendapatan dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam dan menyebarkan potensi yg terdapat di desa.

Sejak 2015, desa-desa di Indonesia telah menerima dana desa dari pemerintah. Dana desa menyediakan pendanaan bagi pemerintahan, pembangunan, dan penguatan komunitas. Memperkuat komunitas desa. Pemerintahan desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara optimal untuk mendorong pembangunan desa dan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri pada Negeri (Permendagri) angka 20 Tahun 2018 mengatur wacana pedoman pengelolaan keuangan desa. berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut, perencanaan, aplikasi, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban meliputi semua tindakan yang berkaitan menggunakan pengelolaan keuangan desa. menggunakan pengawasan, tertib, dan transparan, keuangan desa dikelola.

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan aturan pendapatan serta belanja desa (APBDesa) tahunan sinkron dengan peraturan desa. planning Keuangan Desa (APBDesa) disusun setiap tahun mulai lepas 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Pendapatan pemerintah kota adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua dana yang diterima oleh pemerintah kota melalui rekening pemerintah kota. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah kota untuk dikenakan pajak selama satu tahun, dan pemerintah kota tidak perlu membayar pajak tersebut. Namun, semua uang yang diterima oleh desa disimpan di rekening desa. Uang ini dapat digunakan untuk membayar semua biaya kotamadya. Mereka dapat disimpan di rekening bank tertentu. Oleh karena itu, jika ini dianggap sebagai rekening desa secara definisi, hal itu juga akan menjawab pertanyaan apakah sebuah desa dapat memiliki lebih dari satu rekening. Pedoman untuk pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa tersebut belum memiliki rekening bank.

2.1 Sumber Pendapatan Desa

Sesuai Undang-Undang angka 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 72 Ayat 1 mengenai asal pendapatan desa terdiri asal beberapa komponen:

- a) Pendapatan orisinal desa yg bersumber berasal desa itu sendiri
- b) Sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara
- c) Sebagian asal penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bersumber asal kabupaten/kota
- d) Bagian alokasi dana desa menjadi bagian asal dana perimbangan kabupaten/kota
- e) Dukungan keuangan dari anggaran pendapatan serta belanja daerah.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan ini dan tujuan penelitian, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

- a) Hipotesis nol (H_0): Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan desa di Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023.

- b) Hipotesis alternatif (H1): Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan desa di Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023.

Tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam pendapatan desa antara ke 2 tahun tadi. berdasarkan yang akan terjadi uji Wilcoxon signed-rank, nilai p (0,735) lebih besar berasal (0,05). Akibatnya, hipotesis nol (H0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H1) ditolak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian jurnal ini, peneliti menggunakan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan pendapatan desa antara tahun 2022 dan 2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan data pendapatan dua tahun untuk mengidentifikasi perubahan tren, perbedaan signifikan, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dinamika pendapatan desa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tingkat ketergantungan keuangan desa dan tingkat kemandirian keuangan desa, yang memberikan gambaran ketergantungan desa terhadap dukungan pemerintah dibandingkan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadaan perekonomian desa melalui analisis komparatif, mengidentifikasi upaya-upaya yang berhasil dan tidak berhasil, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa di masa depan. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel-variabel eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan desa, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan faktor alam, untuk memberikan gambaran yang lebih luas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yg dipergunakan dalam penelitian ini bersumber asal publikasi “Statistik Keuangan Pemerintahan Desa” tahun 2022 serta 2023. Publikasi ini diterbitkan sang Badan sentra Statistik atau lembaga yang bertugas memantau serta melaporkan statistik keuangan desa di Jawa Barat. Variabel primer yang dianalisis adalah pendapatan desa. Pendapatan desa bersumber dari beberapa sumber, seperti pendapatan perjuangan desa (pendapatan orisinil desa), bantuan pemerintah sentra (APBN), pendapatan yg bersumber asal pajak serta retribusi daerah, serta alokasi dana desa menjadi bagian berasal total dana perimbangan. Dukungan keuangan berasal aturan Pendapatan dan Belanja wilayah Provinsi serta aturan Pendapatan dan Belanja wilayah Kabupaten/Kota, bantuan gratis dan sumbangan tidak mengikat asal pihak lain, dan pendapatan lain yang bersifat harus. informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini tersaji dalam satuan mata uang lokal (misalnya rupiah).

Information yang digunakan dalam studi ini disajikan di bawah ini:

Pendapatan Desa		
Bagian	2022	2023
Pendapatan Asli Desa	334.369.508.076	305.311.401.452
Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)	6.131.237.755.904	6.218.629.414.912
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	927.113626.880	898.113.977.088
Alokasi Dana Desa yang Merupakan Bagian dari Dana Pertimbangan yang Diterima Kabupaten/Kota	3.200.467.664.896	3.223.293.997.056
Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat Dari Pajak Ketiga	699.183.615.232	698.152.350.208
Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi dan APBN Kabupaten/Kota	777.761.676.128	832.930.717.440

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	62.741.959.746	59.555.701.271
-------------------------------	----------------	----------------

Sumber data: Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 dan 2023, Volume 43, 2024, Hal 261

4.1 Uji Normalitas

Tests of Normality

Pendapatan Desa	Tahun	Shapiro-Wilk	df	Significance	Lilliefors	df	Significance
Pendapatan Desa	Tahun 2022	.358	7	.007	.759	7	.016
	Tahun 2023	.363	7	.006	.758	7	.015

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: diolah oleh SPSS 26

Ket: Hasil dari uji normalitas berdasarkan uji Shapiro-Wilk untuk jumlah sampel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sign) pada tabel Shapiro-Wilk adalah 0,016 pada tahun 2022 dan 0,015 pada tahun 2023, yang menunjukkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga uji Wilcoxon dapat digunakan untuk sampel yang dipasangkan dengan skala ordinal yang nilainya tidak berdistribusi normal.

4.2 Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pendapatan Desa 2023 - Pendapatan Desa 2022	Negative Ranks	4 ^a	3.00	12.00
	Positive Ranks	3 ^b	5.33	16.00
	Ties	0 ^c		
	Total	7		

- a. Pendapatan Desa 2023 < Pendapatan Desa 2022
- b. Pendapatan Desa 2023 > Pendapatan Desa 2022
- c. Pendapatan Desa 2023 = Pendapatan Desa 2022

Sumber data: diolah oleh SPSS 26

Ket: Akibat asal uji normalitas sesuai uji Shapiro-Wilk buat jumlah sampel 7 memberikan bahwa nilai signifikansi (sign) pada tabel Shapiro-Wilk adalah 0,016 pada tahun 2022 dan 0,015 pada tahun 2023, yang menggambarkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sebagai akibatnya, uji Wilcoxon dapat dipergunakan buat sampel yang dipasangkan dengan skala ordinal yang nilainya tidak berdistribusi normal.

4.3 Test Statistics

Test Statistics^a

Pendapatan Desa 2023 - Pendapatan Desa 2022

Z	-.338 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.735

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Sumber data: diolah oleh SPSS 26

Kriteria Uji:

Jika P-value < a (0,05), maka H0 ditolak

Jika P-value > a (0,05), maka H0 diterima

Kesimpulan 0,735 > 0,05, maka H0 diterima

Ket: Hasil dari uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai p-value (0,735) di atas nilai yang dianggap signifikan (0,05), menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar daripada nilai a (0,05), yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) diterima. Artinya, pendapatan desa di Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023 tidak berbeda secara signifikan.

5. KESIMPULAN

Mengingat pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, maka keuangan desa harus dikelola dengan baik sesuai menggunakan ketentuan yang berlaku buat mendukung pembangunan desa. Tujuan penelitian ini ialah buat memberikan gambaran awam wacana perkembangan ekonomi desa tahun 2022 serta 2023. Metode komparatif dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui disparitas pendapatan desa tahun 2022 serta 2023 serta menilai ketergantungan dan kemandirian keuangan desa. tidak terdapat disparitas statistik keuangan pemerintah desa tahun 2022 serta 2023. Hal ini bisa dicermati dari yang akan terjadi penelitian menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji Wilcoxon signed-rank untuk menguji perbedaan pendapatan desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2022 serta 2023. Hal ini ditunjukkan menggunakan nilai P yg lebih besar dari tingkat signifikansinya. Nilai tersebut merupakan (0,05), atau 0,735. ada empat nilai yg mengalami penurunan, yaitu median 3,00 serta rangking total 12,00. tiga nilai lainnya semakin tinggi sebesar 5,33 pada peringkat homogen-homogen dan 16,00 di peringkat total.

REFERENSI

- Apresziyanti Desy, Wiyekti Ndari, Wardhani Dyah Evita, Jati Sunyoto Wahyu, Arini Silvia. (2024, Januari 17). *STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA 2022 DAN 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia.
- Mariyadi. (2020, Agustus 2). Retrieved from UPDESA.com: <https://updesa.com/pendapatan-desa/>